

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawas Obat dan Minuman (BBPOM) di Surabaya yang dilaksanakan secara daring, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberikan gambaran kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas dan fungsi apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
2. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat membekali calon apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).
3. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya secara daring maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pembaharuan (*upgrade*) pada sistem aplikasi *software* BPOM dengan dilakukannya penggabungan dimana dalam satu aplikasi tersebut sudah memuat semua *menu* (opsi) yang umumnya diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pelaku usaha maupun non pelaku usaha sehingga tidak perlu mengakses dari laman

link atau website yang berbeda-beda selain itu, dapat memberikan kemudahan untuk pengguna aplikasi dari BPOM agar menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang menggunakan aplikasi BPOM.

2. Perlu dilakukan peningkatan perihal pemberian informasi kepada masyarakat terkait problematika yang sedang terjadi saat ini, dengan melakukan iklan dalam bentuk animasi yang dapat ditayangkan di televisi maupun media sosial BPOM. Pada anggota masyarakat yang berdomisili jauh dari perkotaan, informasi dapat disajikan melalui pemajangan spanduk atau poster serta dapat dilakukan melalui metode penyuluhan atau sosialisasi.
3. Dapat dilakukan penambahan waktu untuk sesi tanya jawab pada saat penyampaian materi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Besar POM di Surabaya *Rencana Strategis 2020-2024*.
- BPOM RI, 2004, *Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2011, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 Tentang Metode Analisis Kosmetika, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2016, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2017, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta*.

- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Cemaran Dalam Kosmetika*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2020, *Peraturan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2020, *Peraturan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2021, *Pedoman Tata Cara Registrasi Pangan Olahan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2021, *Penjelasan Badan POM RI Tentang Ketentuan Perizinan Pangan Olahan Yang Disimpan Beku*: <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/142/Penjelasan-Badan-POM-RI-Tentang-Ketentuan-Perizinan-Pangan-Olahan-yang-Disimpan-Beku.html> (diakses Minggu, 01/05/2022 pukul 16:00).
- BPOM RI, 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas*

*Pelayanan Kefarmasian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.*

BSN, 2015, *SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan, Badan Standar Nasional, Jakarta.*

BSN, 2015, *SNI ISO 9001:2015 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu., Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta.*

BS, 2018, *SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta.*

Departemen Kesehatan RI, 2014, *Farmakope Indonesia Edisi V, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.*

Departemen Kesehatan RI, 2020, *Farmakope Indonesia Edisi VI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.*

Departemen Kesehatan RI, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta.*

Departemen Kesehatan RI, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta.*

Direktorat Registrasi Pangan Olahan, *Booklet I Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan, Badan POM RI.*

DPR RI dan Presiden RI, 1999, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Jakarta.*

DPR RI dan Presiden RI, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Rakyat Indonesia, Jakarta.*

DPR RI dan Presiden RI, 2012, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, Jakarta.*

Keputusan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan BPOM RI, 2019, *Tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.*

Majelis Ulama Indonesia, 2014, Surat Keputusan Nomor: SK 49/Dir/LPPOM MUI/XII/14 Tentang Kebijakan Analisis Laboratorium.

- Menkes RI, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2020, *Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 1990, *Peraturan Menteri Kesehatan RI, 1990, Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2013, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 2004, *Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan*, Jakarta.
- Peraturan Presiden RI, 2017, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Jakarta.